

ANALISIS KEPEMIMPINAN XI JINPING MEMPERTAHANKAN SISTEM EKONOMI TIONGKOK MELALUI TEORI NEO-MARXISME TENOKRASI

Syalmi Fitria¹, Tito Handoko²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Riau

Email Korespodensi: syalmifitria1510@grad.unri.ac.id

Email: tito.handoko@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study examines the leadership policies of Xi Jinping through the lens of Neo-Marxist technocracy in addressing the trade war with the United States. This research aims to analyze the application of Neo-Marxism in Xi Jinping's political-economic policies and to explore its manifestation in his leadership style. A qualitative approach is employed using a case study method, drawing on international documents, China's foreign policy, and domestic responses to Xi Jinping's governance. The findings reveal that Xi Jinping has adapted a modernized form of Neo-Marxism to sustain China's position within the global system. This adaptation is reflected in strategic economic policies, strong state intervention, and an emphasis on national resilience. Moreover, his leadership style is characterized by technocratic governance, centralized authority, and a strong orientation toward nationalism. In conclusion, Neo-Marxist technocracy under Xi Jinping has evolved into a flexible and pragmatic ideological framework that serves to legitimize state power while maintaining political stability and economic continuity

Keywords: *Leadership*, Neo-Marxism Technocracy, Policy Analysis of Xi Jinping.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kepemimpinan Xi Jinping melalui Neo-Marxisme Tenokrasi dalam mengatasi perang dagang dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Neo-Marxisme dalam kebijakan ekonomi politik Xi Jinping dan menganalisis penerapan Neo-Marxisme dalam gaya kepemimpinan Xi Jinping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk mengkaji dokumen internasional, kebijakan luar negeri Tiongkok, serta respon domestic terhadap gaya kepemimpinan Xi Jinping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Xi Jinping mengadaptasi Neo-Marxisme yang di modernisasi dalam setiap kebijakan dalam mempertahankan posisi Tiongkok dalam sistem global. Selain itu, gaya kepemimpinan Xi Jinping cenderung tenokrasi, terpusat dan nasionalis. Kesimpulannya, Neo-Marxisme Tenokrasi di era Xi Jinping mengalami transformasi menjadi ideologi yang fleksibel sebagai alat legitimasi kekuasaan negara.

Kata kunci: Kepemimpinan, Neo-Marxisme Tenokrasi, Analisis Kebijakan Xi Jinping.

PENDAHULUAN

Sistem Internasional didirikan kembali untuk memajukan serangkaian kepentingan politik, ekonomi atau jenis kepentingan lainnya, karena kepentingan dari beberapa aktor kemungkinan berbenturan dengan kepentingan aktor lainnya, maka kepentingan khusus yang diutamakan dalam sistem tersebut mencerminkan distribusi kekuasaan (*relative power*) dari aktor-aktor yang terlibat atau mewakili kepentingan aktor yang paling kuat di dalam sistem (*hegemony*) (Gilpin, 1981). Negara-negara maju di dunia pada suatu waktu memiliki pola yang sama dalam pembangunan ekonomi dan kepemimpinan politik. Para politikus, menciptakan pemikiran yang kemudian dibangun oleh pemerintahan melalui upaya yang konsisten, kepraktisan, modernisasi, dan perumusan kebijakan. Para pemimpin negara maju mengakui bahwa cara produksi negara perlu diarahkan dan dimanfaatkan menuju pembangunan sosial-

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

449

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



ekonomi negara dan telah menggunakan metode ini untuk mendorong reformasi yang memanfaatkan sebaik mungkin cara produksi, pembangunan dan kemajuan nasional (Okide & Banwo, 2025).

Tiongkok resmi masuk menjadi anggota WTO pada 10 November 2001, sejak masuknya Tiongkok ke WTO negara tersebut mencetak prestasi menjadi salah satu pengeksportir barang terbesar di dunia. Tahun 2009 Tiongkok menjadi eksportir terbesar di dunia dan pada tahun 2014 melampaui Uni Eropa. Masuknya Tiongkok ke dalam keanggotaan WTO menjadikan pertumbuhan ekspor Tiongkok sangat cepat, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam produksi dan pendapatan negara tersebut. Hal tersebut mampu menjadikan Tiongkok menjadi negara yang dapat menyaingi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. negara ini menjadi negara adidaya yang menguasai perekonomian global, dalam perdagangan barang komoditas maupun barang konsumsi.

Bergabungnya Tiongkok dengan WTO meningkatkan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok meningkat sebanyak 81% dalam tiga tahun pertama keanggotaan Tiongkok dibanding pada tiga tahun terakhir sebelum bergabung dengan WTO yakni hanya 34%. Pada tahun 2004 nilai perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai 600 Triliun dollar AS. Kebijakan *American First* pada tahun 2017 menjadi penyebab awalnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada bulan Mei 2018, Tiongkok-Amerika Serikat memiliki kesepakatan untuk menghindari perang dagang yang dipublis pada 19 Mei 2018. Namun 10 hari setelahnya Amerika Serikat menaikkan tarif Import sebesar 25% terhadap produk teknologi industri Tiongkok. Kemudian 1 Desember 2018, KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina Tiongkok-Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdagangan yang sehat. Namun Trump kembali melanggar kesepakatan dan memberikan tarif tinggi untuk produk impor Tiongkok.

Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan terbesar ke-dua mengalahkan Jepang. Dalam beberapa dekade terakhir Tiongkok di pimpin Presiden Xi Jinping yang merupakan Presiden Tiongkok paling kuat setelah Mao Zedong. Xi Jinping memiliki motivasi yang tinggi sebagai pemimpin dan dapat mempengaruhi bawahannya. Xi Jinping lahir 15 Juni 1953 Beijing lebih tepatnya kota Zhongnanhai. Xi Jinping memiliki gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas karena dapat memajukan Tiongkok sejak dilantik menjadi Presiden pada tahun 2013. Dimana pada tahun sebelumnya berhasil menjadi Sekretaris Jendral Partai Komunis Tiongkok setelah memenangkan hasil pemungutan suara dalam pertemuan parlemen (Safika Rahmawati & Kunci, 2021).

Xi Jinping sejak awal pemerintahannya sudah aktif melakukan perubahan-perubahan dalam kebijakan yang kuat dan efektif dalam memajukan perekonomian dan pertahanan Tiongkok. Program dan upaya yang dilakukan Xi Jinping didasari nilai-nilai sosialis khas Tiongkok menghasilkan kecerenduran rasa nasionalis yang tinggi, dan pemimpin negara menjadi sosok yang diidolakan bagi rakyatnya. Sangat menarik mengetahui lebih dalam pemikiran dan kehidupan Xi Jinping hingga dapat memberikan pengaruh yang besar bagi rakyat Tiongkok. Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping terfokus pada menjalin kerjasama dengan negara lain dengan menuju "kekuatan dunia baru". Hal ini membuat pihak lain yang sejak lama memegang kendali kekuatan "super power" merasa hegemoni-nya terancam, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam hegemoni-nya dengan argumentasi masyarakat internasional bahwa Tiongkok bergerak massif menjadikan Tiongkok "The Rising Power" dibawah kepemimpinan Xi Jinping secara geo-politik (Jeverson Maya, 2022).

Xi Jinping mengambil semua pemikiran dan teori pemimpin sebelumnya dalam merumuskan arah kebijakan, "China's Dream" mengusulkan empat belas kebijakan yang menempatkan Partai Komunis China sebagai pemimpin utama. Pendekatan ideologi Marx, Mao Zedong dan Hu berorientasi pada rakyat, mendorong reformasi, mendorong penggunaan gagasan ilmiah untuk pembangunan, menerapkan prinsip sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, serta memperkuat keamanan nasional Tiongkok. Walaupun mendapat sanksi impor dari Amerika Serikat, Tiongkok tetap memperluas pengaruh geo-politik dibawah kepemimpinan Xi Jinping melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) melalui proyek infrastruktur di Asia Selatan khususnya *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). Di Asia Tengah BRI berfokus pada,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

450

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



kereta api, jalan raya yang menghubungkan Kazkhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kyrgyztan. Timur Tengah, Tiongkok mengejar kemitraan bilateral untuk mengamankan pasokan minyak dan gas dari Arab Saudi, UEA, dan Iran. Sementara di Eropa, Tiongkok mengadopsi pendekatan investasi selektif di Eropa Timur dan Selatan melalui “17+1 Initiative” mencakup kerjasama budaya, pendidikan, terkhusus investasi di Pelabuhan Yunanu dan rute kereta api di Serbia dan Hungaria. Dalam peningkatan kepercayaan domestik, Xi Jinping berfokus pada transformasi domestic, transformatif yang telah dimulai sejak akhir 1970-an. Pada tahun 2000-an, Tiongkok berpindah ke manufaktur yang bernilai tinggi dan peningkatan teknologi seperti kebijakan “Made in China 2025” berfokus pada industri maju robotika, kendaraan listrik (Naseem et al., 2025).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa prinsip kepemimpinan Xi Jinping, yang pertama fokus pada perencanaan kerjasama ekonomi baik domestik maupun regional. Kedua, supremasi kepemimpinan Xi Jinping fokus pada sosioal-ekonomi dalam membimbing, mengarahkan, dan pembangunan dan kemajuan negara, ketiga pemimpin Tiongkok telah melakukan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan alat produksi negara demi melayani kepentingan rakyat. Dari penjelasan singkat diatas, peneliti mengkombinasikan Marxisme dan gaya kepemimpinan Xi Jinping dalam konflik perdagangan antara Tiongkok-Amerika Serikat dimana pentingnya ideologi kepemimpinan dalam merumuskan strategi kebijakan negara, maka tulisan ini akan menjawab bagaimana gaya kepemimpinan Xi Jinping mempengaruhi posisi dan strategi Tiongkok dalam sistem ekonomi global?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berfokus pada penelitian terdahulu yang dapat menjelaskan Neo-Marxisme dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Xi Jinping dalam kepemimpinannya mempertahankan posisi Tiongkok sebagai kekuatan global bersaing dengan Amerika Serikat.

PEMBAHASAN

Sejarah Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Awal Mula hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki sejarah yang rumit dan panjang. Salah satu peristiwa yang paling penting yaitu Perjanjian Wanghia 1844 yang dikenal sebagai “*Treaty of Peace, amity, and commerce, between the United States of America and the Chinese Empire*” menjadi perjanjian pertama yang ditandatangani Amerika Serikat dan Tiongkok dan menjadi landasan utama kedua negara memahami hubungan ekonomi. Perjanjian ini dinilai tidak seimbang dimana lebih memberikan hak istimewa perdagangan yang lebih besar kepada Amerika Serikat di Tiongkok dibandingkan dengan Inggris. Perjanjian ini berisi 30 pasal tentang hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok serta tuntutan Pemerintahan Tiongkok. Isi dari tuntutan tersebut mencakup pembatasan kemampuan Tiongkok untuk mengubah tingkat tarif secara sepihak dan perselisihan antara kedua negara akan diselesaikan berdasarkan hukum Amerika Serikat. Meskipun interaksi ekonomi telah terjadi, ketegangan antara kedua negara kembali ketika munculnya *Chinese Exclusion Act* yang melarang orang Tiongkok bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Namun pada tahun 1972, Presiden Nixon melakukan kunjungan ke Tiongkok dan merupakan langkah maju bagi hubungan kedua negara dalam bidang perdagangan, militer, dan sebagainya.

Tiongkok bergabung dengan WTO tahun 2001 dan menjadi anggota ke-143 dan menjadi negara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

451

Indexed



SINTA 4



dengan urutan ke-6 PDB 1.3 triliun dollar dan pada saat yang sama Amerika Serikat berada pada urutan yang pertama PDB 13.6 triliun dollar. Sebagaimana besar pertumbuhan ekonomi Tiongkok melalui sektor manufaktur. Namun Tiongkok melakukan pergeseran mengembangkan pusat teknologinya. Laporan *IPLytics* yang memimpin perlombaan paten 5G menunjukkan bahwa Perusahaan Huawei asal Tiongkok memiliki paten 5G terbanyak dibanding perusahaan lainnya di seluruh dunia. Hal ini menjadi tanda jelas bagi Amerika Serikat bahwa Tiongkok sedang berubah dari pengelola teknologi menjadi produsen teknologi. Tahun 2017, Tiongkok menjadi pasar impor barang dagangan terbesar bagi Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat mengimpor produk senilai 506 miliar dollar dari Tiongkok. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah mitra dagang terbesar di dunia dengan total nilai perdagangan 659,8 miliar dolar. Hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok saling menguntungkan dan ketergantungan satu sama lain. Hubungan ini sangat berpengaruh tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi seluruh dunia karena kekayaan yang diciptakan melalui kemitraan ini mendukung pembangunan dan pemeliharaan ekonomi negara-negara lain (Yawei, 2020). Dalam perspektif Neo-Marxisme atau strukturalisme, kondisi ini mencerminkan adanya struktur ekonomi global yang saling terhubung, di mana hubungan antarnegara tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kapitalisme dunia (Steans & Pettiford, 2009). Ketergantungan tersebut tidak netral, tetapi membentuk relasi kekuasaan antara negara pusat (*core*) dan negara yang berperan sebagai basis produksi atau manufaktur dalam sistem global.

Pada awalnya, Tiongkok berada di *periferal* paling luar dari sistem tersebut, dan hanya mampu menyediakan komoditas berbasis sumber daya, seperti batu bara, minyak, dan bahan mentah lainnya. Namun dari perspektif analisis per kapita, keunggulan komparatif Tiongkok bukanlah bahan mentah melainkan tenaga kerja. Di bawah dorongan bersama kekuatan pasar dan kebijakan, sejak 1985 lebih dari 50% ekspor Tiongkok adalah produk manufaktur. Seiring berjalannya waktu, proporsi ini semakin besar, dan kandungan modal serta teknologi produk manufaktur industri juga semakin meningkat. Dengan kata lain, Tiongkok sedang mengalami proses evolusi dari negara pengekspor bahan mentah *periferal* menjadi negara industri *periferal*, dan terus mendekati pusat melalui inovasi teknologi.

Salah satu hasil dari semakin kuatnya kehadiran Tiongkok sebagai pusat manufaktur dan perakitan barang Amerika Serikat adalah hilangnya lapangan kerja manufaktur bergaji rendah di Amerika Serikat. Namun, ekspor barang teknologi tinggi ke Tiongkok menciptakan lapangan kerja baru yang menggantikan pemindahan pekerja Amerika. Pada tahun 2015 ekspor ke Tiongkok menyediakan 1,8 juta lapangan kerja baru bagi Amerika. Amerika Serikat menjual produk bernilai tinggi dan teknologi ke Tiongkok, sementara Tiongkok terutama mengekspor barang manufaktur ke Amerika Serikat. Dalam kerangka strukturalisme, pola ini mencerminkan pembagian kerja internasional (*international division of labour*), di mana negara pusat *core* seperti Amerika Serikat mempertahankan dominasi pada sektor teknologi tinggi, sedangkan negara seperti Tiongkok berperan sebagai basis produksi manufaktur (Jackson & Sorensen, 1999). Namun, berbeda dari pola klasik dependensi, Tiongkok mulai bergerak naik dalam struktur global dengan meningkatkan kapasitas teknologinya, sehingga berpotensi menggeser posisi hierarkis dalam sistem ekonomi dunia. Intinya adalah bahwa selama periode ini, hubungan antara Tiongkok dan negara pusat sistem adalah hubungan simbiosis kepentingan daripada hubungan kompetisi dan konfrontasi.

Bagi negara ekonomi berskala besar seperti Tiongkok, ketika skalanya berkembang pesat, sistem yang ada semakin sulit menampung beban tersebut. Pada saat yang sama, industri manufaktur di negara-negara maju yang didominasi Amerika Serikat mengalir keluar, dan industri keuangan berkembang pesat, yang memperburuk polarisasi antara kaya dan miskin di masyarakat. Defisit transaksi berjalan Amerika Serikat terus meningkat, defisit fiskal besar muncul berturut-turut, dan negara-negara berkembang mengakumulasi cadangan dalam jumlah besar. Ekonomi global menghadapi ketidakseimbangan serius, fenomena di atas akhirnya menyebabkan munculnya populisme dan proteksionisme perdagangan. Perang dagang antara kekuatan baru dan kekuatan yang mempertahankan posisi terjadi. Ketika kekuatan yang sedang bangkit bersaing dengan hegemon yang sudah mapan, tantangan tersebut sebagian besar berakhir dengan perang. konflik antara Tiongkok dan AS berujung pada perang dagang yang rumit (Xiu et al., 2021).

Dua negara adidaya dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat tidak hanya memiliki sistem politik dan formalisme yang berbeda. Namun yang lebih penting, gaya kepemimpinan masing-masing pemimpin di setiap periode memiliki dampak mendalam terhadap status dan perkembangan kedua negara di dunia. Secara singkat Amerika Serikat adalah satu-satunya hegemon dunia. Dalam persaingan kekayaan dan kekuasaan, orang Amerika percaya pada kelangsungan hidup yang kuat. Sebuah negara di mana aktivitas komersial sangat dihargai dan institusi dibentuk untuk melindungi kepentingan komersial, serta presiden selalu dipilih oleh rakyat. Donald Trump terpilih sebagai presiden ke-45 Amerika pada tahun 2016. Menurut Boylan, Trump dengan “*Trump ways*” dalam menangani urusan, memainkan peran penting dalam pecahnya perang dagang AS-Tiongkok.

Tiongkok memiliki kekuasaan rezim yang dikendalikan oleh Partai Komunis China dan mengutamakan komunisme. Xi Jinping, yang mempromosikan kebijakan *One Belt One Road*, sehingga Tiongkok menjadi negara adidaya yang sedang bangkit terbaru. Dengan melihat hubungan dan rezim kedua negara, kita dapat menyimpulkan secara wajar bahwa kedua negara dihubungkan oleh hubungan antara negara maju terbesar dan negara berkembang, antara sosialisme dan kapitalisme, serta antara negara inti dan negara *semi-periferal*. Konflik tidak terhindarkan. Kepentingan politik dan ekonomi global AS sebagian besar didasarkan pada hegemoninya yang absolut, kepentingan tersebut akan rusak begitu status nomor satu hilang.

Amerika Serikat secara sepihak menuduh Tiongkok melakukan empat jenis agresi ekonomi. Pertama, melindungi pasar lokal dari persaingan luar negeri, termasuk tarif tinggi, hambatan non-tarif, dan regulasi lainnya. Selain itu, memperluas pangsa pasar lokal Tiongkok dan mengalahkan rival internasional melalui regulasi pemerintah dan subsidi. Selanjutnya, mengendalikan sumber daya alam inti dunia dan menggunakan jebakan utang predator untuk memberikan pembiayaan besar kepada negara-negara berkembang. Terakhir, mendominasi manufaktur tradisional berdasarkan pinjaman di bawah pasar sebagai imbalan sumber daya alam dan menerobos pasarnya. Amerika Serikat percaya bahwa Tiongkok sedang berusaha melanggar kepentingan Amerika pada berbagai isu, termasuk eksploitasi bisnis, campur tangan dalam pemilu Amerika, *spionase*, mempublikasikan propaganda di surat kabar Amerika, memaksa jurnalis Amerika, upaya mengeksploitasi mahasiswa, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Amerika Serikat belum pernah menghadapi negara seperti Tiongkok, yang berpotensi melampauinya. Pada Maret 2018, setelah bertahun-tahun menempuh strategi yang berbeda, Amerika Serikat memutuskan untuk menghadapi Tiongkok secara langsung. Perang dagang yang diprakarsai oleh kepemimpinan Trump berupaya menghilangkan ancaman dari Tiongkok. Perang dagang ini melibatkan dua ekonomi terbesar di dunia yang bertarung mengenai manufaktur, perdagangan, teknologi, dan masa depan tata kelola keuangan global. Dalam perspektif Neo-Marxisme, konflik ini dapat dipahami sebagai bentuk kontestasi antar kekuatan dalam struktur kapitalisme global, di mana negara pusat *core* berupaya mempertahankan hegemoninya terhadap aktor yang sedang naik (*rising power*). Sejalan dengan pemikiran Immanuel Wallerstein dalam *world-systems theory*, sistem dunia kapitalis selalu ditandai oleh dinamika konflik antara negara pusat dan aktor yang berupaya naik posisi dalam hierarki global.

Pada 14 Juni 2019, Duta Besar Tiongkok Jianmin Zhang menyatakan bahwa “AS terus mengambil langkah-langkah sepihak dan proteksionis serta menerapkan hegemoni ekonomi. Untuk melindungi kepentingan nasional kami, kami tidak punya pilihan selain merespons dengan langkah-langkah tegas”. Pernyataan ini memperkuat pandangan Neo-Marxisme bahwa negara-negara berkembang atau *semi-periphery* akan melawan dominasi negara pusat *core*. Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chunyin Hua, juga menegaskan bahwa “Tiongkok akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan kami yang adil dan sah”. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran struktural atas posisi dalam sistem global dan upaya untuk mengubah relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Perang dagang belum berhenti, yang terlihat dari penjualan senjata antara AS dan Taiwan. Hubungan antara AS dan Taiwan selalu menjadi bagian penting dari hubungan AS–Tiongkok. Dalam perspektif strukturalisme, aspek geopolitik ini menunjukkan bahwa dominasi dalam sistem dunia tidak

hanya ditentukan oleh ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan militer dan kontrol wilayah strategis. Pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok bahwa “Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok sepenuh” mencerminkan upaya mempertahankan kedaulatan dalam menghadapi tekanan dari kekuatan hegemoni.

Analisis Kebijakan Tiongkok Dalam Mengatasi Perang Dagang Amerika Serikat Menggunakan Teori Neo-Marxisme

1. Strategi Dual-Circulation

Strategi ini menjadi respon utama Tiongkok terhadap perang dagang yang dimuali dari 2018. Xi Jinping mengedepankan strategi *dual-circulation*, yakni memperkuat konsumsi domestik sekaligus menjada keterhubungan dengan pasar internasional sebagai langkah penting menghadapi ketidakpastian global (Adinda Tias Salsabila, 2025). Kebijakan ini memperbesar konsumsi lingkaran domestik melalui stimulus konsumsi rumah tangga, investasi infrastruktur, dan inovasi teknologi dan juga mempertahankan lingkaran internasional melalui BRI dan perdagangan dengan negara kawasan dan organisasi perdagangan internasional. Tujuan kebijakan ini jelas untuk mengurangi kerentanan terhadap tarif Amerika Serikat tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi sehingga Tiongkok dapat mengalihkan kelebihan kapasitas industri dalam negeri ke negara mitra. *Dual-circulation* bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan alat pertahanan struktural yang mengintegrasikan kepentingan politik, keamanan nasional.

Dalam perspektif Neo Marxisme (Wardhani, 2016), *dual-circulation* adalah manifestasi nyata “perjuangan kelas pada tingkat internasional”. Asumsi dasar Neo Marxisme “Masyarakat terdiri dari berbagai kelas yang berbeda, yaitu kelas borjuis dan protelar. Perjuangan kelas adalah hakikat dari perjuangan ideologi Marxisme”. Pada skala global, Amerika Serikat berperan sebagai “kelas borjuis inti” yang menggunakan perang dagang untuk mempertahankan dominasi, sementara Tiongkok sebagai *semi-periphery* melakukan perlawanan melalui negara sebagai alat. *Dual-circulation* memungkinkan Tiongkok melakukan revolusi sosialis terhadap struktur imperialisme global dengan memperkuat *productive forces domestic*, sehingga mengurangi ketergantungan pada modal dan pasar *core*. Hal ini sesuai dengan hukum Marxisme “Ketika ekonomi kapitalis mencapai kedewasaan, dipaksa untuk mencari koloni”, Xi Jinping menjadikan mitra sebagai “koloni baru” bagi surplus Tiongkok. *Dual-circulation* menegaskan peran negara sebagai instrument transformasi struktural, ditegaskan dalam teori Neo-Marxisme “Negara Dunia ketiga pun telah siap untuk melakukan revolusi sosialis”.

Dengan menggabungkan konsumsi domestik (memperkuat basis internal kelas pekerja) dan konektivitas internasional (memperluas pengaruh), Xi Jinping mengubah Tiongkok menjadi subjek hegemonik dalam *world system*. Kebijakan ini bukan *defensive* melainkan ofensif dialektis, mengatasi kontradiksi internal (ketergantungan teknologi) sekaligus kontradiksi eksternal (hegemoni Amerika Serikat), sehingga “perubahan kuantitas menjadi kualitas” Tiongkok naik kelas dalam tatanan global. Analisis ini membuktikan bahwa *dual-circulation* adalah manifestasi paling tinggi neo-marxisme struktural kontemporer, dimana revolusi yang memanfaatkan negara-partai untuk menggeser Tiongkok dari posisi dieksploitasi menjadi kekuatan hegemoni baru, membuktikan bahwa dalam era kapitalisme modern, kontrol negara atas *productive forces* tetap menjadi senjata paling ampuh untuk mengubah kontadiski struktural dunia.

2. Made in China 2025

Kebijakan ini menjadi strategi Xi Jinping mengatasi perang dagang dengan Amerika Serikat dengan mendorong kemandirian teknologi nasional. *Made in China 2025* menjadi pilar utama untuk mendorong kemandirian teknologi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri di sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi, energi terbarukan dan kecerdasan buatan (Adinda Tias Salsabila, 2025). Kebijakan ini menetapkan target ambisius agar pada tahun 2025 Tiongkok mampu memproduksi 70% komponen kunci secara mandiri, sehingga serangan tarif Amerika Serikat terhadap impor teknologi tidak lagi melumpuhkan rantai pasok domestik. Xi Jinping mempercepat investasi negara di bidang R&D, subsidi industry strategis, dan pembatasan impor teknologi, sekaligus

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

454

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



mendorong perusahaan nasional seperti Huawei dan SMIC untuk menggantikan pemasok dari Amerika Serikat. Meski Amerika Serikat memberlakukan larangan ekspor *chip*, Tiongkok berhasil mempertahankan pertumbuhan sektor teknologi tinggi bahkan mempercepat inovasi internal. Dengan *Made in China 2025*, Tiongkok tidak lagi menjadi objek eksploitasi dalam *world-system*, melainkan subjek yang mengubah struktur tersebut, menggeser posisi *semi-periphery* menjadi pusat produksi teknologi global, membalik hukum kapitalisme yang mengharuskan Tiongkok mencari koloni baru.

3. Belt and Road Initiative (BRI)

Belt and Road Initiative merupakan kebijakan yang komprehensif untuk menetralkan dampak perang dagang Amerika Serikat, dengan membangun jaringan infrastruktur global yang langsung mengalihkan surplus produksi dan berupaya memperluas pengaruh ekonominya secara global, membuka pasar baru ke negara mitra (Adinda Tias Salsabila, 2025). Kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur darat dan laut yang menghubungkan Tiongkok dengan 150 negara, sehingga menciptakan koridor perdagangan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Pemerintahan Tiongkok menegaskan BRI merupakan proyek raksasa mencakup 2/3 populasi global dan 3/4 sumber energi hal ini bertujuan untuk menjadi hegemoni Kawasan (Anam, 2018). *“Through initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI), China has established vital trade corridors, secured energy supplies, expanded technological reach, and fostered diplomatic relations that contribute directly to its economic strength.”* (Naseem et al., 2025). Dalam prakteknya Xi Jinping mempercepat pembangunan pelabuhan, kereta cepat, pipa gas, dan *digital silk road* di lebih dari 150 negara, sehingga Ketika Amerika Serikat memberikan sanksi impor dengan tarif 25% Tiongkok langsung mengalihkan ekspor baja, semen, dan mesin ke Afrika, Asia Tengah, dan Eropa Timut, untuk menjaga GDP tetap diatas 6% meski terus mendapat tekanan sanksi impor dari Amerika Serikat.

Dengan mengamankan jalur energi dan membuka pasar baru, BRI memutus rantai ketergantungan (*dependency*) yang selama ini menjebak *semi-periphery* sekaligus memperkuat *productive forces* nasional sesuai dengan teori neo-marxisme. Xi Jinping tidak lagi menunggu revolusi *proletary* global, melainkan menggunakan BRI sebagai “revolusi dari atas” yang mengintegrasikan kepentingan nasional dengan perjuangan kelas internasional, mengubah Tiongkok dari objek eksploitasi menjadi subjek hegemoni baru dalam *world-system*. Kebijakan ini membuktikan bahwa dalam era kapitalisme monopoli, negara yang sadar struktural mampu mengubah kontradiksi global menjadi peluang akumulasi dan kepemimpinan, sehingga BRI bukan hanya infrastruktur, melainkan senjata neo-marxisme praktis untuk merebut masa depan tatanan dunia dan menjadi kebijakan Tiongkok dalam mempertahankan posisi strategis Tiongkok dalam sistem internasional.

Penguatan Ideologi dan Anti-Korupsi Sebagai Konsolidasi Internal

Penguatan Ideologi *“socialism with Tiongkok characteristic for a new era”* disertai kampanye anti-korupsi untuk konsolidasi internal Xi Jinping untuk memperkuat fondasi negara menghadapi perang dagang Amerika Serikat. (Rudd, 2022) menegaskan *“Xi is now the embodiment of his new ideological mantra of ‘the spirit of struggle’... the return of Marxist-Leninist ideology as a driving force... and the absolute audacity of his political strategy. This includes his preparedness to overturn long-established party conventions... smash through bureaucratic inertia impeding the realization of his ambitions.”* Kampanye anti korupsi yang masif berhasil membersihkan birokrasi dari unsur-unsur korupsi sehingga seluruh sumber daya negara dapat difokuskan sepenuhnya pada pertahanan ekonomi tanpa kebocoran atau penghianatan internal. Di penelitian terdahulu ditegaskan bahwa Xi Jinping telah menetapkan 14 bidang utama yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi Tiongkok. 14 bidang terfokus pada ekonomi, sosial, budaya, ekologi, keamanan nasional, pertahanan, diplomasi, teknologi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemerintahan yang bersih dan pembangunan partai, dimana semua bidang ini harus digerakkan secara terpadu dan terarah Xi Jinping menegaskan kan agar pemimpin politik harus mengambil kendali penuh untuk mengarahkan semua kekuatan produksi

ekonomi agar bermanfaat bagi rakyat dan negara, terutama ditengah tekanan luar oleh Amerika Serikat (Okide & Banwo, 2025).

Kebijakan Xi Jinping merupakan pemikiran neo-marxisme yang dimodernisasi dimana negara bukan hanya pengawas tapi perancang utama pembangunan dengan memaksimalkan kekuatan produktif demi kesejahteraan rakyat dan kekuatan nasional. “*spirit of struggle*” merupakan penguatan ideologi yang memobilisasi kesadaran seluruh partai dan rakyat untuk menerima pengorbanan jangka pendek demi kemenangan struktural, sementara anti-korupsi memastikan tidak ada pemborosan atau pengkhianatan internal yang melemahkan *front* ekonomi.

Analisis Gaya Kepemimpinan Xi Jinping Mempengaruhi Posisi dan Strategi Tiongkok Dalam Sistem Ekonomi Global.

Kepemimpinan Xi Jinping bukan sekedar kelanjutan dinasti PKC (Partai Komunis China) melainkan puncak evolusi sistematis yang menggabungkan visi ideologis Marxisme-Leninis dengan rasionalitas teknokratik modern yang secara keseluruhan membentuk *figure “ideological man”* dan “*paramount technocrat*”. Dalam penelitian kepribadian mendalam oleh Immelman dan Chen, menggambarkan Xi Jinping sebagai **Dominant/controlling** (skor 14-22) yang dikombinasikan dengan **Conscientious/respectful** dan **Ambition/confident**. Xi Jinping dijelaskan memiliki pola dominan-kontrol, tekun-teknokratik dan ambisius-visioner. Profil pola kepemimpinan Xi Jinping bukan hanya psikologis tetapi fondasi yang *deliberative “likely to exhibit a deliberative leadership style; they are well informed, exhibit depth of comprehension, are able to visualize alternatives and weigh long-term consequences”*(Immelman & Chen, 2021).

“Xi Jinping is now the embodiment of his new ideological mantra of ‘the spirit of struggle’ the return of Marxist-Leninist ideology as a driving force and the absolut audacity of his political politic, overturn long-established party conventions”(Rudd, 2022) Xi Jinping menghidupkan kembali Marxisme-Leninisme sebagai kekuatan utama dan sangat berani membalikkan aturan lama partai serta menghancurkan birokrasi yang lambat.

Sejak Kongres ke-18 dengan Xi Jinping sebagai pemimpin, Partai Komunis China telah memahami tren zaman baru, menjawab era baru. Pemikiran ini mempertahankan jiwa “popularisasi” dari Marxisme, merangkum secara mendalam praktik sosialisme Tiongkok dan membuka babak baru Marxisme di abad ke-21. Xi Jinping menekankan bahwa mengembangkan Marxisme abad ke-21 harus berpijak kepada Tiongkok, melihat ke dunia, slalu mengikuti zaman, dan terus memajukan Marxisme agar sesuai dengan kondisi Tiongkok, sesuai zaman, dan mudah dipahami rakyat (*popularization*) sehingga Marxisme bersinar lebih terang (Qiu, 2019).

Dalam teori neo-marxisme tenokrasi yang dijelaskan Gunnell gaya kepemimpinan Xi Jinping adalah perpaduan sempurna antara ideologi dan teknokrasi. Neo-marxisme struktural melihat negara sebagai alat kelas yang digunakan untuk mengubah struktur kapitalisme global. Xi Jinping mewujudkan ini dengan sempurna dimana dia adalah “*paramount technocrat*” yang menggunakan partai sebagai mesin tenokratik untuk mengoptimalkan *productive forces* sambil menghidupkan ideologi “*spirit of struggle*” sebagai kesadaran kelas nasional. Profil dominan Xi Jinping sesuai dengan “*coercive technocracy*” Gunnell dimana kekuasaan untuk mengendalikan dan memaksa subordinasi demi stabilitas produksi. Sifat *conscientious* Xi Jinping adalah implementasi dari “*rational bureaucracy*” yang merancang kebijakan detail. Sifat ambisi Xi Jinping adalah “*charismatic technocrat*” yang menyuntikkan visi nasionalis untuk mobilisasi massa. Kevin Rudd menegaskan bagaimana Xi Jinping menggabungkan ini dengan “*winner takes all*” (Rudd, 2022) *politics* dan 14 *blueprint* ekonomi, menciptakan sistem dimana kepemimpinan bukan lagi kolektif ala Deng, melainkan teknokrasi ideologis tunggal yang menjamin reproduksi hegemoni Tiongkok di era multipolar.

Dalam Neo-Marxisme melihat imperialisme dari sudut pandang *periphery*. Xi Jinping menggunakan teknokrasi untuk “revolusi dari semi-periphery” dimana negara mengendalikan kontradiksi kapitalisme

(perang dagang) melalui kontrol sentral, anti-korupsi, dan ideologi perjuangan agar terakumulasi modal negara tetap dominan. Ini merupakan bentuk Neo-Marxisme Teknokratik abad ke-21 dimana Xi Jinping sebagai “*great helmsman technocrat*” memadukan *dialectical materialism* sebagai *big data governance* dan perencanaan awal kebijakan ekonomi dalam mempertahankan posisi strategis Tiongkok dalam sistem internasional serta menekan dampak dari serangan tarif impor Amerika Serikat.

KESIMPULAN

Setiap kebijakan yang diterapkan oleh Xi Jinping untuk mempertahankan posisi Tiongkok di sistem tatanan dunia tidak lepas dari ideologi dan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan dominan dan ambisius dalam dilihat dari kemampuan Xi Jinping “*smash bureaucratic inertia*” dan mengambil alih posisi sebagai negara hegemon Kawasan melalui kebijakan *Belt and Road Initiative*. Gaya kepemimpinan yang *conscientious/technocratic* dapat dilihat dari kebijakan Xi Jinping fokus pada 14 bidang dan *productive forces* serta kebijakan *dual-circulation*. Gaya kepemimpinan Ideological dilihat dari kampanye Xi Jinping yang mengintegrasikan “*Popularization of Marxism*” dan “*spirit of struggle*”. Menunjukkan bahwa Xi Jinping menerapkan pendekatan teknokratik-ideologis yang sangat sistematis. Xi Jinping menggabungkan 14 bidang prioritas dengan prinsip Marxisme yang diperbarui: negara dan Partai harus mengendalikan serta memaksimalkan kekuatan produktif ekonomi untuk merekayasa pembangunan rakyat. Pendekatan ini terlihat jelas dalam kebijakan besar seperti *Dual Circulation*, *Made in China 2025*, dan *Belt and Road Initiative*. Dengan demikian, Xi Jinping bukan hanya pemimpin biasa, melainkan seorang insinyur besar yang merancang seluruh sistem pembangunan Tiongkok menjadi kuat, mandiri, dan mampu menghadapi tekanan eksternal seperti perang dagang AS.

REFERENSI

- Adinda Tias Salsabila. (2025). Strategi Pertahanan Ekonomi China di Era Xi Jinping : Integrasi Kepentingan Nasional dan Pengaruh Global. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 104–113. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i4.1186>
- Anam, S. (2018). *Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*. <http://www.iris->
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politic*. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/war-and-change-in-world-politics-by-robert-gilpin-new-york-cambridge-university-press-1981-pp-xiv-272-1995/3BB7D4C754CA4069B68702A82591276C>
- Gunnell, J. G. (1982). The Technocratic Image and the Theory of Technocracy. In *Source: Technology and Culture* (Vol. 23, Number 3). https://www.researchgate.net/publication/11740243_The_Technocratic_Image_and_Theory_of_Technocracy/link/565f2d6408afe619b285550/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Immelman, A., & Chen, Y. (2021). *THE PERSONALITY PROFILE AND LEADERSHIP STYLE OF CHINA'S PRESIDENT XI JINPING Paper presented at the 44 th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology Virtual Conference*. <http://personality-politics.org/>
- Jeverson Maya, A. (2022). *KEKUASAAN PENDISPLINAN : FANTASI DONALD TRUMP DAN XI JINPING*. 7(7), 11. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11802>
- Naseem, R., Khan, A., & Khan, A. U. (2025). *The Critical Review of Social Sciences Studies The Rise of China: Analyzing the Drivers of Its Economic Growth in the 21st Century*. 3(3), 121–130. <https://thecrsss.com/index.php/Journal/about>
- Okide, U., & Banwo, A. (2025). XI JINPING'S LEADERSHIP IN CHINA'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BLUEPRINT. *Malikussaleh Social & Political Reviews*, 6(2), 80–97. <https://doi.org/10.29103/mspr.v6i2.23673>
- Qiu, J. (2019). *Xi Jinping's Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a new Era adheres to*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

457

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

the essence of Marxism “popularization” and opens up a new realm of Marxism.

<https://www.atlantis-press.com/proceedings/mmetss-19/125919621>

Rudd, K. (2022). *Xi Jinping, the Rise of Ideological Man, and the Acceleration of Radical Change in China*. https://asiasociety.org/policy-institute/xi-jinping-rise-ideological-man-and-acceleration-radical-change-china?utm_source=chatgpt.com

Safika Rahmawati, M., & Kunci, K. (2021). *KEPEMIMPINAN XI JINPING DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN CHINA*.

https://www.researchgate.net/publication/352554846_KEPEMIMPINAN_XI_JINPING_DALAM_MEMAJUKAN_PEREKONOMIAN_CHINA_Mukti_Safika_Rahmawati_20200610433

Wardhani, B. L. S. W. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik Vinsensio Dugis*. www.csgsunair.org

Xiu, M., Liu, K., & Han, H. (2021). *Explaining US-China Trade War: Clash Between Core Country and Semi-Periphery Country*. <https://www.atlantis-press.com/article/125959638.pdf>

Yawei, L. (2020). *The US-China Trade War and What About It*.

<https://share.google/D76yzq0MwhGgJiX2L>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

458

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

